

Pemanfaatan Indeks Desa dalam Pembangunan Daerah

Oleh :

H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum, Hairul Ikhwan, S.Hut.
Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Dengan penguatan frase “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Dalam menggambarkan hasil pembangunan dari pinggiran terdapat beberapa indeks yang dapat digunakan diantaranya Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Bappenas dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. Pengukuran IPD dibangun dari data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh BPS dan digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks.

Sementara IDM adalah indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Indeks ini disusun mulai tahun 2015 dengan memberdayakan seluruh desa di Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menghasilkan data yang akurat. Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa / Lingkungan.

Status IDM berbeda dengan IPD yang dikeluarkan oleh BPS dan Bappenas. Dimana IPD membagi perkembangan status desa dalam tiga klasifikasi yakni Desa Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri. Masing-masing status terbagi lagi menjadi tiga perkembangan, mula, madya dan lanjut. Terdapat lima dimensi dalam IPD yaitu : pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan.



Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo maka dilakukanlah pembuatan indikator tunggal dalam mengukur capaian pembangunan desa. Pada 4 Maret 2024 diluncuranlah Indeks Desa sebagai indikator tunggal pembangunan desa. Indeks Desa menjadi indikator kinerja pembangunan desa yang universal, sejalan dengan implementasi pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, menuju Indonesia Emas 2045.

Ringkasan

Mewujudkan pembangunan yang merata serta menekan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan menjadi prioritas Pembangunan, dan salah satu lokusnya adalah Desa. Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa. Desa harus mau dan mampu tumbuh dan maju bersama dan selaras dengan kota. Dalam mengukur keberhasilan pembangunan desa digunakanlah indeks.

Indeks Desa akan menjadi indikator tunggal dalam mengukur capaian pembangunan desa, dan menggantikan 2 indeks yang sudah ada sebelumnya yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM).

Secara nilai IPD 2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai sebesar 66,91 dan ini merupakan nilai tertinggi di Kalsel. Nilai IDM juga menggambarkan capaian yang baik dan terus terjadi peningkatan, begitupula dari perkembangan status desa (IDM) dimana dari tahun ketahun jumlah desa tertinggal semakin sedikit, dan desa maju semakin banyak serta melahirkan desa-desa mandiri yang baru. Tahun 2021 menjadi moment baik dimana desa tertinggal sudah tidak ada lagi, yang mana pada Tahun 2020 masih tersisa 2 desa. Dan pada Tahun 2021 ini jugalah hadir 3 desa mandiri pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ada beberapa penekanan yang menjadi perhatian yaitu :

1. Menjadikan indeks desa sebagai alat kontrol, dan penunjuk arah prioritas dalam Pembangunan Desa. Mulai dari perencanaan, penganggaran, serta kebijakan lainnya
2. Urgensi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait indeks desa agar masyarakat tahu akan kondisi desa dan adanya peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
3. Keberadaan Indeks Desa yang baru perlu ada koordinasi lintas *stakeholder* dan BPS.
4. Hasil evaluasi makro IPD dan IDM di Kab. HSS maka perlu kebijakan dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa.
5. Permasalahan sosial, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, putus sekolah selayaknya juga menjadi perhatian lebih besar dengan keberadaan Indeks Desa.
6. Pengembangan inovasi dalam peningkatan PADes, pengelolaan koperasi atau BUMDes, dan mengoptimalkan potensi desa.

TINJAUAN KEBIJAKAN

Penyelesaian ketimpangan menjadi salah satu Visi Indonesia Emas 2045, yakni kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang. Di 2023, BPS mencatat kemiskinan perdesaan mencapai 12,22 persen, di atas kemiskinan perkotaan yakni sebesar 7,29 persen. Untuk itu, mewujudkan pembangunan yang merata harus menekan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa. Desa harus mau dan mampu tumbuh dan maju bersama dan selaras dengan kota.

Indeks Desa mengukur pembangunan desa melalui enam dimensi, yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Indeks Desa dapat menjadi acuan utama penyusunan kebijakan pembangunan desa di berbagai dokumen perencanaan di tingkat pusat, daerah, hingga desa.

Hasil perhitungan Indeks Desa akan digunakan secara resmi pada 2025, dengan basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT dalam rentang April/Mei hingga Juni 2024. Pada Tahun 2025 Indeks Desa diukur oleh BPS.

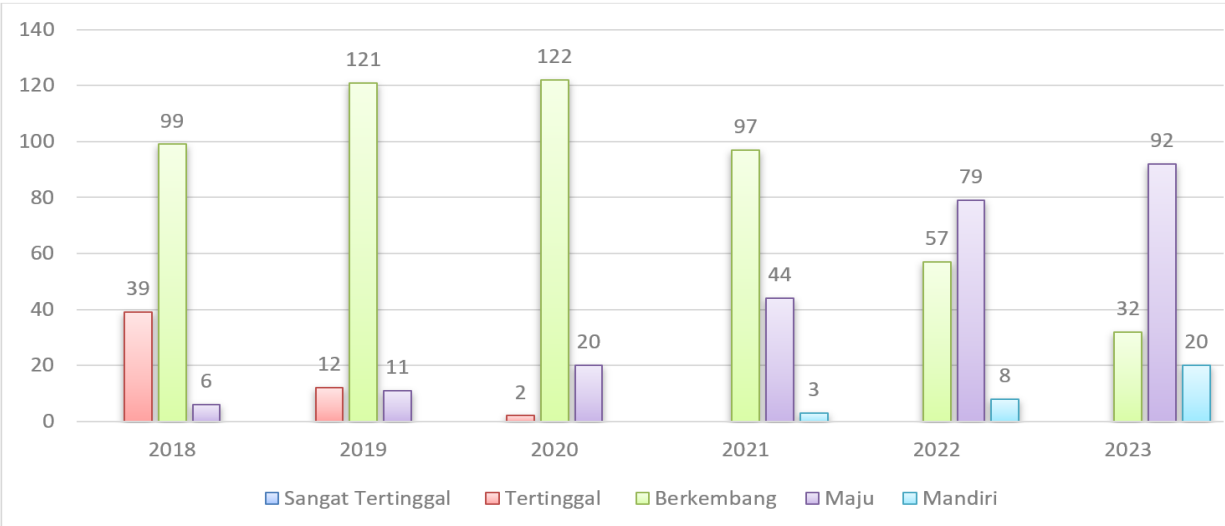


Adapun untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan kalau dilihat dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2018 (yang terakhir) dan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2018 – 2023 telah menggambarkan capaian yang baik dan terus terjadi peningkatan.

Kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai sebesar 66,91 dan ini merupakan nilai tertinggi kalau dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada sekitar 2,78 % desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan sebagai Desa Tertinggal (4 desa), 88,19 % sebagai Desa Berkembang (127 desa), dan 9,03 % sebagai Desa Mandiri (13 desa).

Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD					Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tanah Laut	63,91	64,29	52,69	76,71	56,70	72,04	1,54	94,62	3,85	130
Kota Baru	57,86	52,62	44,19	74,21	60,46	72,05	21,72	72,73	5,56	198
Banjar	61,09	61,39	46,76	77,54	53,85	69,87	9,39	88,45	2,17	277
Barito Kuala	59,41	62,08	43,27	70,66	51,97	75,19	9,74	88,21	2,05	195
Tapin	60,39	60,56	49,97	74,17	50,15	68,49	10,32	88,89	0,79	126
Hulu Sungai Selatan	66,91	70,05	51,98	79,91	55,83	78,90	2,78	88,19	9,03	144
Hulu Sungai Tengah	62,42	62,95	49,05	76,06	53,52	75,22	6,83	90,06	3,11	161
Hulu Sungai Utara	60,00	58,18	50,97	75,22	50,30	67,62	5,14	93,46	1,40	214
Tabalong	62,55	59,25	52,09	76,59	59,31	73,70	3,31	92,56	4,13	121
Tanah Bumbu	61,64	55,82	50,16	80,12	56,94	75,87	10,42	81,94	7,64	144
Balangan	60,91	55,54	50,33	77,29	56,01	75,76	8,44	88,96	2,60	154
Kalimantan Selatan	61,28	60,06	48,74	76,09	54,79	72,82	8,64	87,71	3,65	1 864

Status Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 - 2023



Satus desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari hasil Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di tahun 2018 ada perbedaan. Dimana dari Indeks Pembangunan Desa (IPD) ditetapkan Desa Tertinggal sebanyak 4 desa, Desa Berkembang 127 desa, dan Desa Mandiri 13 desa, sedangkan dari Indeks Desa Membangun (IDM) ditetapkan Desa Tertinggal sebanyak 39 desa, Desa Berkembang 99 desa, dan Desa Maju 6 desa.

Perbedaan ini tentu ada karena adanya perbedaan dalam indikator dan jumlah dimensi yang digunakan dalam pengukuran indeks, selain itu pembagian status desa juga jauh berbeda dimana di Indeks Pembangunan Desa (IPD) dikenal 3 status desa, yaitu ; Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Mandiri, sedangkan Indeks Desa Membangun (IDM) dibagi dalam 5 status desa, yaitu : Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Kehadiran Indeks Desa kedepan akan menjadi indikator tunggal dalam mengukur capaian pembangunan desa, indikator kinerja pembangunan desa yang universal dan sejalan dengan implementasi pemerataan Pembangunan. Pada Tahun 2024 ini merupakan tahun transisi, dari 2 indeks menjadi satu indeks dalam pengukuran Pembangunan di desa, yaitu Indeks Desa.

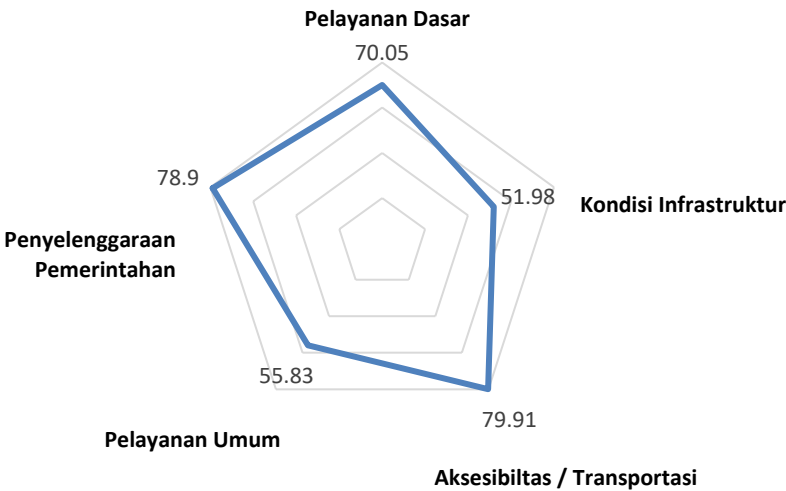
Pada Indeks Desa, pembagian status desa sama dengan yang ada di Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu dibagi dalam 5 status desa (Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri). Adapun dimensi dalam Indeks Desa merupakan penyempurnaan dari 2 indeks sebelumnya. Dimana Indeks Desa mengukur pembangunan desa melalui enam dimensi, yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Tahun 2024 yang merupakan tahapan transisi ini menjadi penting untuk dilakukan evaluasi secara umum ditingkatkan Kabupaten terkait hasil capaian 2 indeks yang sudah ada. Baik capaian hasil indeks, perkembangan status desa dan juga deminsi atau indeks ketahana pada IDM.

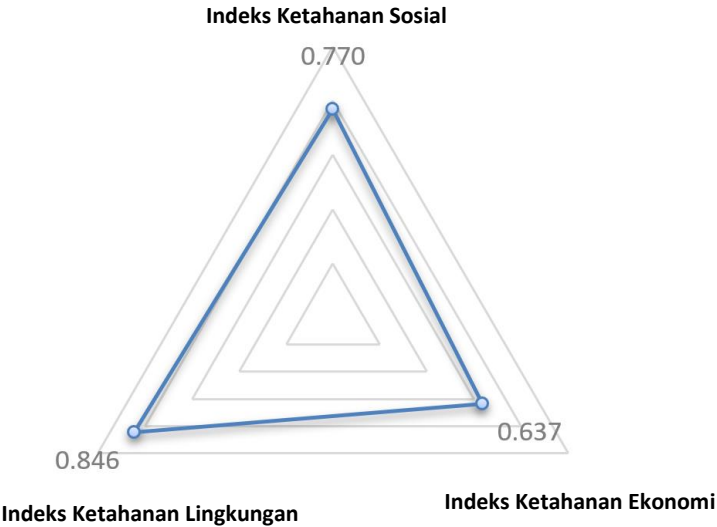
Secara nilai indeks di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggambarkan capaian yang baik dan terus terjadi peningkatan, begitupula dari perkembangan status desa (IDM) dimana dari tahun ketahun jumlah desa tertinggal semakin sedikit, dan desa maju semakin banyak serta melahirkan desa-desa mandiri yang baru. Tahun 2021 menjadi moment baik dimana desa tertinggal sudah tidak ada lagi, yang mana pada Tahun 2020 masih tersisa 2 desa. Dan pada Tahun 2021 ini jugalah hadir 3 desa mandiri pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Evaluasi makro juga dapat dilakukan dari indikator atau dimensi serta indeks dari pembentuk IPD dan juga IDM. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa IPD memiliki 5 dimensi yaitu : pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan umum/publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dalam IDM ada 3 indeks sebagai pembentuk nilai indeks utama yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa / Lingkungan

5 Dimensi pada IPD Kab. HSS Tahun 2018



3 Indeks pada IDM Kab. HSS Tahun 2023



Pada IPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 terlihat dari 5 dimensi pembentuk ada kesenjangan yang terjadi di 2 dimensi, yaitu dimensi kondisi infrastruktur dan dimensi pelayanan umum. Sedangkan pada IDM tahun 2023 ada kesenjangan pada nilai indeks Ketahanan Ekonomi.

Tentu perbandingan ini tidak bisa dikatakan ideal karena adanya perbedaan dalam indikator dan jumlah dimensi yang digunakan dalam pengukuran indeks, serta juga ketersediaan data yang berbeda tahun, dimana data IPD yang tersedia adalah tahun 2018 dan IDM Tahun 2023. Sehingga perbandingan ini tentu tidak ideal, namun dibalik itu dalam proses evaluasi secara makro masih ada beberapa benang merah yang dapat dihubungkan dalam memberikan beberapa kesimpulan.

Kesenjangan yang terjadi ada di 2 dimensi IPD 2018, yaitu dimensi kondisi infrastruktur dan dimensi pelayanan umum, dan pada IDM tahun 2023 ada kesenjangan pada nilai indeks Ketahanan Ekonomi. Kesenajangan ini pada dasarnya ada korelasi yang cukup kuat dimana perekonomian di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur dan pelayanan umum.

Pembangunan infrastruktur (jalan, kelistrikan, komunikasi, dan pelayanan transportasi) memiliki keterkaitan positif dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur tidak hanya mampu melayani kebutuhan dari aktivitas ekonomi saja, tetapi juga mampu menstimulasi kegiatan ekonomi baru di suatu wilayah.

Indeks akan menjadi penting ketika datanya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah, baik Tingkat Nasional, Provinsi, Daerah dan juga Desa. Masyarakat juga seharusnya dapat memanfaatkan data ini sebagai Kompas Pembangunan wilayahnya. Secara garis besar Indeks Desa dapat dimanfaatkan dalam perencanaan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa, pengalokasian dana desa dan penyusunan kebijakan Pembangunan desa.

Hasil analisa data di atas setidaknya dapat memberikan Gambaran dan memerikan arah fokus yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pemanfaatan data IPD dan IDM serta nantinya dengan Indeks Desa. Ada beberapa penekanan yang menjadi perhatian yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sengai Selatan harus lebih fokus menjadikan indeks desa sebagai alat control, dan penunjuk arah prioritas dalam Pembangunan Desa. Mulai dari perencanaan, pengalokasian anggaran, serta kebijakan lainnya. Sehingga pembangunan desa akan lebih tepat sasaran. Dengan mengetahui area mana saja yang perlu ditingkatkan, pemerintah dapat memfokuskan program dan kebijakan pembangunan pada area-area tersebut.
2. Masyarakat desa perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait indeks desa sehingga masyarakat tahu akan kondisi desa. Bagi Masyarakat indeks ini dapat menjadi bahan advokasi untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pembangunan desa. Hal ini harapannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan mengetahui kondisi desa, masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan dan potensi desa. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
3. Indeks Desa sebagai pengganti IPD dan IDM mulai diukur pada tahun 2024 ini dan dirilis mulai tahun 2025 tentu akan nada beberapa perubahan indikator dan juga keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga perlu ada koordinasi lintas *stakeholder* dan masukan dari BPS sebagai perbaikan kualitas pembangunan di desa, serta dapat memiliki persepsi yang sama dalam pengambilan kebijakan agar lebih tepat sasaran dan berpihak pada desa.
4. Hasil evaluasi makro IPD dan IDM di Kab. HSS maka perlu kebijakan dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa, seperti : Program dan kegiatan dengan lokus wilayah desa harus diarahkan pada peningkatan keragaman produksi masyarakat desa, penyediaan pusat pelayanan perdagangan, peningkatan akses distribusi/logistik, peningkatan akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, pembentukan dan optimalisasi lembaga ekonomi seperti koperasi, BUMDES, serta penyediaan infrastruktur untuk menunjang keterbukaan wilayah seperti pembangunan jalan desa atau penghubung desa.
5. Permasalahan sosial, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, putus sekolah selaknya juga menjadi perhatian lebih besar kedepannya karena pada Indeks Desa ke depan akan ada 6 dimensi, dan 2 di antaranya adalah dimensi sosial dan layanan dasar.
6. Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat perlu melakukan langkah-langkah terobosan dalam mewujudkan Desa yang Mandiri. Inovasi-inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), pengelolaan koperasi atau BUMDes, dan mengoptimalkan potensi desa seperti Desa Wisata, pertanian dan lainnya. Inovasi-inovasi ini dapat belajar dari desa yang sudah berhasil seperti gambar di bawah ini.

